

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tentunya pemerintah membutuhkan beberapa sumber penerimaan negara untuk memenuhi serta menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang tidak terlepas dari masalah pendanaan. Sumber penerimaan negara dapat diperoleh melalui berbagai sektor. Sumber penerimaan negara yang pertama berasal dari kekayaan alam yang sebagian besar berasal dari sektor migas, sumber penerimaan negara yang kedua berasal dari laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sumber-sumber lainnya yang berasal dari percetakan uang serta pinjaman dan sumber penerimaan ketiga yang berasal dari sektor pajak. Agar dapat meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, maka sektor pajak merupakan salah satu alternatifnya karena sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang potensial serta memiliki jumlah yang relatif stabil karena pada dasarnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum Mardiasmo (2011:1). Sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu sebagai fungsi budgeter, pajak digunakan sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan guna membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin serta pembangunan. Dalam pembayaran nya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung kepada individual yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil yang diperoleh digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta bea materai, selain pajak pusat terdapat juga pajak daerah, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan guna membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak nya Indonesia memiliki 3 macam sistem, yaitu:

- a. *official assesment system*, merupakan suatu sistem pemungutan dimana yang memberikan wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatatur pajak (fiskus)
- b. *self assessment system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak
- c. *withholding system*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan transaksi nya dengan pihak lain serta menentukan besarnya pajak yang harus dipungut sesuai

dengan objek pajak tersebut dan menyetorkan serta melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Dan dalam penerapannya, Indonesia menganut *self assesment system*. Salah satu ciri-ciri dari sistem ini yaitu menuntut wajib pajak untuk ikut serta aktif dalam pelaksanaannya baik menghitung, menyetor serta melaporkan besarnya pajak terutang tersebut. Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak yang sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya.

Untuk mengurangi terjadinya tindak pelanggaran dalam hal tersebut maka diperlukan adanya tindakan penegakan hukum serta pengawasan terhadap wajib pajak. Tindakan penegakan hukum serta pengawasan dapat dilakukan dengan adanya penyelidikan atau pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti yang dilaksanakan secara profesional dan objektif berdasarkan suatu standart pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak dapat melunasi utang pajak yang berasal dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak serta biaya dalam penagihan pajak.

Jika dari hasil pengawasan atau pemeriksaan tersebut timbul pajak yang kurang atau belum dibayar atau dipungut dan dipotong maka terhadap wajib pajak tersebut akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan atau surat keputusan harus dibayar sebelum jatuh temponya yakni satu bulan semenjak surat tersebut diterbitkan. Jika atas utang pajak tersebut tidak dilunasi tepat pada waktunya, terhadap wajib pajak atau penanggung pajak maka akan diterapkan langkah penagihan pajak terhadap tindakan tunggakan yang dimaksud, tindak penagihan pajak yang dilaksanakan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dengan demikian maka tindak penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan suatu perwujudan untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Dasar penagihan pajak untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM adalah terdiri dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi bertambah. Berdasarkan jenisnya, penagihan pajak dibedakan menjadi 3, yaitu, penagihan aktif, penagihan pasif serta penagihan seketika dan sekaligus

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penagihan pajak tersebut yaitu tahap pertama dengan menerbitkan surat teguran. Jika dalam tempo tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak/penanggung pajak belum melunasi besarnya pajak terutang, maka surat teguran akan di kirimkan kepada pihak wajib

pajak/penanggung pajak. Tujuan dari diterbitkan nya surat teguran adalah agar wajib pajak atau penanggung pajak segera melunasi besarnya pajak terutang. Apabila wajib pajak tidak melunasi besarnya utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo serta wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau dalam penundaan pembayaran pajak tersebut, maka akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa yaitu surat perintah untuk membayar besarnya utang pajak serta biaya penagihan pajak. Surat paksa tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Dalam surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat lagi diminta banding pada Hakim atasan. Berdasarkan uraian diatas maka betapa pentingnya pemahaman atas prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA SIDOARJO”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai masalah yang diteliti, yaitu prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian dalam ruang lingkup pajak ini diharapkan dapat memberikan serta menambah informasi atau pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas maka penulisan laporan ini hanya akan membatasi pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo pada tahun 2018.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan sebuah penelitian maka diperlukan adanya data-data yang akurat. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada pihak responden. Pada metode ini data

diperoleh dengan cara melakukan proses tanya jawab kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

2. Observasi, yaitu teknik pencatatan atau pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkaitan dengan organisasi bertujuan untuk pencarian data. Pada metode ini data diperoleh dengan cara pengamatan langsung di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang langsung ditunjukkan pada objek penelitian melalui dokumen. Dalam metode ini data yang diperoleh melalui laporan pada pelaksanaa penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

